

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan sebuah negara unik dengan karakteristik masyarakat yang homogen di benua Asia. Walaupun secara geografis negara titisan dewa matahari ini dikategorikan sebagai bagian dari Asia, namun sebenarnya ia terletak terpisah dari daratan utama benua Asia. Selain letak geografis yang sedikit berbeda dengan negara Asia lainnya, karakter unik lain yang dimiliki Jepang adalah memiliki dua persepsi mengenai kapasitas nasionalnya sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sebelumnya Jepang memandang negaranya sebagai negara kuat yang mampu meningkatkan kemakmuran nasional serta memperkuat pertahanan dengan membangun militer yang kuat. Akan tetapi setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang memandang dirinya sebagai negara yang kuat apabila berhasil membangun sektor ekonomi yang kuat pula (Takashi & Jain, 2000, hlm. xiv).

Hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sanksi internasional atas kealahannya pada Perang Dunia II, Jepang kemudian diduduki secara *de facto* oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan militer Jenderal Mc Arthur (Tjeng, 1983, hlm. 363). Hingga tahun 1950, Jepang tidak dapat benar-benar menjalankan politik luar negerinya, bahkan menjadi pangkalan utama bagi Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunisme di Asia yang dibawa oleh Rusia dan China pada era Perang Dingin berlangsung. Jepang menjadi negara “*little brother*” bagi Amerika Serikat yang kemudian memiliki sifat pasifis, yaitu nilai anti militerisme dan hanya berperan sebagai pangkalan penting Amerika Serikat bagi penyebaran pengaruh kapitalisme di Asia (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 68).

Namun dalam perkembangannya pada tahun 1951 melalui Perjanjian Damai San Fransisco, Jepang yang dinyatakan kembali merdeka dengan pembatasan penggunaan persenjataan dan militer aktif oleh internasional, kemudian

mulai merumuskan kebijakan nasionalnya yang dikenal sebagai *fukoku kenzei*, yang berarti komitmen Jepang untuk lebih memperhatikan sektor ekonomi dan tidak terlalu melibatkan diri dalam aspek politik internasional (Tjeng, 1973, hlm. 428). Sehingga Jepang tumbuh menjadi negara yang meminimalisir konfrontasi politik dan memiliki fokus besar terhadap revitalisasi perekonomian yang didasarkan kepada kekuatan sumber daya masyarakatnya dengan perlindungan keamanan dari Amerika Serikat. Karena berdasarkan sejarahnya pun Jepang dahulunya merupakan salah satu negara yang memiliki basis perekonomian besar di kawasan Asia, namun setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II pada tahun 1945, Jepang kemudian merubah arah kebijakannya yang semula bersifat militeristik menjadi lebih pasifis (Tjeng, 1983, hlm. 332-333).

Bahkan hingga kini Jepang tumbuh menjadi negara yang menjalin aliansi dengan Amerika Serikat untuk memperkuat sektor keamanan dan tidak meningkatkan kapabilitas militer aktif agar mendapatkan kepercayaan kembali dari dunia internasional, khususnya negara-negara Asia. Jepang dapat mengubah pencitraan negatif terkait praktik ekspansionismenya saat Perang Dunia II dengan memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Hubungan ini tidak hanya direlisasikan melalui kerja sama pertahanan, namun juga di bidang ekonomi yang terwujud dalam kemitraan perdagangan bebas multilateral *Trans Pacific Partnership* (TPP). Bergabung dengan keanggotaan perjanjian TPP merupakan wadah untuk mendapatkan dua keuntungan sekaligus bagi Jepang, yaitu membangun relasi lebih intens dengan Amerika Serikat dan mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dalam negerinya.

Perjanjian Kemitraan Trans Pasifik merupakan sebuah pengembangan dari kerja sama kemitraan sebelumnya yang bernama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik (TPSEP atau P4) ini pada awalnya diinisiasi oleh lima negara anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), yaitu Amerika Serikat, Australia, Singapura, Chili, dan

Selandia Baru, pada tahun 1990-an. Pembahasan mengenai urgensi adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*) khusus untuk kawasan Asia Pasifik menjadi topik utama yang dibicarakan oleh kelima negara tersebut di setiap sesi non- formal dalam Forum Ekonomi Kerja Sama Asia Pasifik APEC (Elms, 2012, hlm.1-3).

Namun setelah melewati beberapa perundingan non-formal, Amerika Serikat dan Australia menarik diri sementara dari keinginannya untuk bergabung dalam kesepakatan kerjasama tersebut. Rancangan perjanjian kemitraan dalam hal perdagangan ini kemudian hanya dilanjutkan oleh Singapura, Chili, dan Selandia Baru dari tahun 2002 hingga perundingan akhir pada tahun 2004 dalam sebuah forum negosiasi di Wellington, New Zealand. Dalam forum yang diadakan pada bulan Juli 2004 ini, Brunei Darussalam ikut hadir sebagai negara pengamat, yang setahun kemudian ikut bergabung dan mendeklarasikan kesediaannya menjadi negara pelopor Perjanjian Kemitraan TPSEP, bersama Singapura, Chili, dan Selandia Baru. Deklarasi mengenai Perjanjian Kemitraan TPSEP akhirnya diumumkan pada saat pertemuan menteri perdagangan dalam forum APEC tahun 2005 di Korea Selatan (Elms, 2012, hlm. 5).

Walaupun Perjanjian Kemitraan TPSEP ini memiliki fokus utama pada wilayah Asia Pasifik, namun tidak menutup kemungkinan keanggotaan bagi negara- negara diluar kawasan tersebut. Hal ini jelas tercermin pada keanggotaan empat negara pendiri, dimana Brunei Darussalam dan Singapura merupakan negara yang terletak pada kawasan Asia Tenggara, Selandia Baru mewakili kawasan Pasifik, dan Chili sebagai perwakilan tunggal dari kawasan Amerika Latin. Perjanjian perdagangan bebas kawasan Asia Pasifik ini juga sangat menaruh harapan pada keikutsertaan dari negara- negara anggota APEC dan non-APEC terutama di Asia, dengan menekankan tujuan utama dari kemitraan TPSEP adalah untuk memprioritaskan kepentingan bersama dalam berbagai bidang, diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, teknologi, dan pertanian (Asia Nikkei, 2015).

Dengan menekankan pada kepentingan bersama dan pendekatan hubungan kemitraan, maka TPSEP pada dasarnya mampu menjangkau berbagai sektor kerjasama selain dari pada perjanjian awal, dengan mempertimbangkan kesepakatan dari negara anggota. Sehingga perjanjian TPSEP tidak hanya sekedar sebuah perjanjian yang mengutamakan sektor ekonomi dengan sasaran perdagangan bebas dan investasi, namun juga memiliki prinsip utama untuk tidak menaruh batasan topik kerja sama, agar terdapat penambahan kebermanfaatan bagi semua negara anggota (Asia Nikkei, 2015). Selain memiliki cakupan target keanggotaan kepada seluruh dunia dengan kondisi geografis yang beragam, faktor unik lainnya yang terdapat pada TPSEP adalah menjadikan perjanjian ini sebagai acuan dari perjanjian kerjasama lainnya dalam forum APEC itu sendiri.

Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri dari perjanjian TPSEP jika dibandingkan dengan perjanjian kemitraan lainnya bagi negara anggota APEC, terutama Amerika Serikat. Setelah masa transisi kepemimpinan dari Presiden George W. Bush yang kemudian beralih pada kepemimpinan Presiden Barrack Obama, Amerika Serikat kemudian memutuskan keikutsertaannya sebagai negara anggota TPSEP, namun dengan beberapa pembaharuan dalam regulasi kerjasama, seperti tarif pajak ekspor dan impor, pengaturan hak kekayaan intelektual, serta penekanan terhadap regulasi domestik negara anggota yang dapat berubah mengikuti regulasi utama dalam TPSEP (Gurtov, 2015). Oleh karena perubahan beberapa regulasi, maka TPSEP pun kemudian berganti nama menjadi Kerja Sama Trans Pasifik (*Trans Pacific Partnership- TPP*) pada tahun 2008.

Keanggotaan Amerika Serikat tidak hanya mengubah regulasi dan nama bagi TPSEP, namun juga menjadi magnet bagi negara lain untuk ikut bergabung dalam TPP. Hingga pada tahun 2015, Amerika Serikat berhasil meyakinkan Australia, Peru, Vietnam, Kanada, Meksiko, dan khusus Jepang pada tahun 2016 untuk ikut mensukseskan TPP yang kemudian beranggotakan 12 negara (Gurtov, 2015). Meskipun

pada awalnya TPP didirikan oleh Singapura, Selandia Baru, Chili, dan Brunei Darussalam, namun Amerika Serikat bersama dua negara besar koalisinya yaitu Jepang dan Australia mampu memasarkan Kemitraan Trans Pasifik menjadi kerja sama perdagangan bebas yang beskala tinggi bagi kemitraan negara- negara anggota, termasuk didalamnya mengatur sejumlah hak cipta dan paten, standardisasi ketenagakerjaan, serta lingkungan (Elms, 2012, hlm. 10). Sehingga dalam periode 2013 hingga 2015 merupakan masa promosi TPP kepada dunia, khususnya forum kerja sama APEC, sebagai alternatif perjanjian kemitraan yang berkembang dan menjanjikan bagi semua negara dengan prinsip keterbukaan.

Akan tetapi, stabilitas peran dari perjanjian kemitraan ini mulai diragukan sejak keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan tetap pada awal tahun 2017 dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat sebagai penggerak utama dalam liberalisasi perdagangan global negara- negara di kawasan Asia Pasifik kini mulai mencanangkan kebijakan baru, yaitu *America first*, dimana kemitraan yang berbasis multilateral dengan negara lain akan sangat sulit diwujudkan dibandingkan dengan kerjasama bilateral (British Broadcasting Corporation, 2017).

Proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat secara signifikan menurunkan persentase keuntungan dari negara- negara anggota serta menutup kemungkinan adanya keikutsertaan negara- negara Asia, seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan, dalam keanggotaan TPP (Sposato, 2017). Peran Amerika Serikat yang begitu besar dalam Perjanjian Kemitraan TPP didasarkan pada kekuataannya dalam membangun pembukaan pasar yang didasari pada reformasi sektor ekonomi (Takenaka, 2016). Perjanjian Kemitraan TPP memberikan ruang lebih luas berupa akses perdagangan kepada negara- negara berkembang terhadap pasar Amerika Serikat, Jepang dan Australia.

Kepercayaan internasional terhadap efektifitas TPP juga semakin memburuk dikarenakan banyaknya kritik dari para akademisi dan ekonom domestik di berbagai negara,

setelah dokumen perjanjian TPP di terbitkan oleh wikileaks. Kritik terbesar terhadap TPP adalah bentuk perjanjian itu sendiri yang mengandung tiga unsur kuat praktik neoliberalisme, yaitu perdagangan bebas barang dan jasa, sirkulasi bebas kapital, serta kebebasan dalam berinvestasi (Guardian, 2015). Opini publik mengenai buruknya reputasi TPP sudah banyak beredar baik dalam tingkat nasional maupun internasional, yang menyebabkan kondisi TPP pasca pengunduran keanggotaan tetap oleh Amerika Serikat menjadi semakin tidak stabil dengan adanya isu mengenai praktik neoliberal yang memposisikan investor dari berbagai korporasi besar di atas kepentingan masyarakat dan negara (Guardian, 2015).

Namun keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan serta polemik opini publik yang berkembang mengenai buruknya sistem Kemitraan Trans Pasifik tidak mengubah niat Jepang, untuk tetap menaruh kepercayaan yang besar bagi potensi kerja sama yang diawali oleh perjanjian dagang awal Kemitraan Ekonomi Strategis Trans- Pasifik. Jepang kemudian menetapkan perumusan baru dari perjanjian kemitraan regional berbasis ekonomi TPP ini menjadi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership* (CPTPP), dengan meyakinkan pemerintah Australia dan Kanada. Perumusan baru ini juga disetujui oleh sepuluh negara anggota lainnya pada Maret 2018, dengan penambahan pasal yang mempertimbangkan pengajuan hak personal dari tiap perusahaan dalam negara- negara anggota untuk mengatur dan menentukan kebijakan secara mandiri (Mulgan, 2017).

Perdana Menteri Shinzo Abe mengakui akan ada penurunan angka dalam target TPP sejak keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan, begitu juga dengan angka antusiasme negara- negara di Asia untuk bergabung (Takenaka, 2016). Akan tetapi perumusan CPTPP yang bersifat lebih kooperatif terhadap keinginan negara- negara anggota terutama dalam kebijakan hak personal perusahaan, diperkirakan akan mampu menarik beberapa negara di Asia terutama Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Perdana Menteri Shinzo Abe yakin rencana keikutsertaan ketiga negara tersebut dalam

CPTPP akan direalisasikan mengingat faktor pendapatan riil ketiganya akan meningkat secara signifikan setelah bergabung dengan pakta ini, dimana berisi akses yang besar bagi perdagangan dengan negara- negara yang memiliki basis perdagangan yang kuat (Sposato, 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

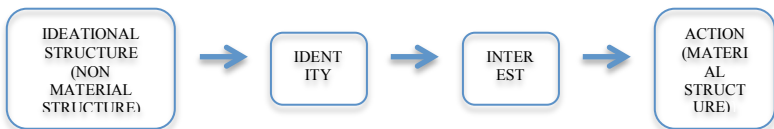
Mengapa Jepang merekonstruksi perjanjian TPP, pasca pengunduran keanggotaan Amerika Serikat tahun 2017?

## **C. Landasan Teoritik dan Aplikasi Teori**

Dalam memberikan jawaban terhadap rumusan masalah menggunakan pertanyaan mengapa, maka penulis akan menggunakan konsep konstruktivisme secara umum dengan detil pemikiran Alexander E. Wendt dan Nicholas Onuf. Konstruktivis menggunakan dasar *inter- subjective* (antar-subjek), norma, agen sosial, dan pengembangan identitas secara timbal balik dalam setiap pendekatannya memahami fenomena sosial yang terjadi di lingkungan internasional (Hadiwinata, 2017, hlm. 264). Sehingga suatu tindakan dalam menyikapi fenomena dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks tertentu walaupun dilakukan oleh aktor global yang sama dalam kurun waktu berbeda, dikarenakan mendapat pengaruh oleh kepentingan, norma, identitas budaya, dan simbol- simbol linguistik (Fierke, 2013, hlm. 189). Hal ini menekankan bahwa setiap tindakan sebuah negara maupun aktor global lainnya tidaklah bersifat kaku dan monoton, melainkan bersifat multi bentuk sesuai dengan konteks tertentu, dalam hal ini berupa kepentingan dan identitas yang didasari struktur ide berdasarkan hasil konstruksi sosial dari kultur tempat bangsa bertumbuh. Sehingga untuk memahami sikap Jepang yang kemudian berinisiatif menjadi *leader* dalam perumusan CPTPP pasca pengunduran Amerika Serikat dari keanggotaan, perlu ditinjau dari prinsip utama pendekatan konstruktivis dimana non material struktur mempengaruhi material struktur.

Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan ilmu Hubungan Internasional yang lahir dari inovasi empirik dan teoritik oleh akademisi- akademisi muda pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an (Ashari, 2015, hlm. 256). Pendekatan ini muncul untuk menjawab tantangan kaum rasionalis yang tidak dapat dijawab oleh kaum *critical theory* (*neorealist* dan *neo institutional liberalist*), mengenai transformasi global seperti berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet pasca Perang Dingin, serta globalisasi (Hadiwinata, 2017, hlm. 265). Konstruktivisme disebut sebagai *the second critical theory*, disebabkan oleh pemakaian landasan yang sama dengan *critical theory*, hanya saja konstruktivisme mampu bergerak secara *mode of abstract* dalam metateori, karena dalam analisisnya bersifat empiris. Konstruktivisme meyakini bahwa tidak hanya kepentingan nasional semata yang mempengaruhi suatu kebijakan negara, namun juga dilandasi struktur ide hasil dari interaksi antar-subjek yang dilakukannya (Hadiwinata, 2017, hlm. 282).

Menurut Alexander E. Wendt, struktur non material berupa ideasional itu memiliki fungsi yang lebih penting karena mampu membentuk identitas dan kepentingan aktor global, seperti negara dan organisasi internasional (Wendt, 1987, hlm. 354-357). Sehingga karakter tindakan (struktur) suatu negara tidak ditentukan oleh unsur material berupa kekuatan ekonomi dan militer saja, melainkan lebih ditentukan oleh unsur budaya setiap negara yang terbentuk melalui interaksi antar- subjek, baik dari dalam maupun luar negerinya. Penjelasan berikut dapat digambarkan melalui model pembentukan kebijakan menurut Alexander E. Wendt di bawah ini:



Gambar 1.1: Model Pembentukan Kebijakan Wendt.



Maka ketika sebuah negara dijadikan sebagai unit analisa, *state-system* yang bersifat *intersubjective* menurut Wendt, harus mendapat perhatian khusus atas dasar identitas dan kepentingan yang dibangun dalam konteks sosial. Jika terdapat perubahan *action* dari sebuah negara, dalam hal ini keputusan Jepang untuk tetap menjadi anggota dari TPP setelah keluarnya Amerika Serikat, maka terdapat juga perubahan identitas yang berasal dari ide, nilai, norma dan prinsip (*ideational structure*) terhadap perubahan *interest*. Struktur ide ini bersifat sangat personal dan berbasis budaya karena melalui proses belajar yang terbentuk melalui interaksi antar-subjek dalam ruang lingkup lingkungan dimana manusia (agen) tumbuh, sehingga pembentukan struktur non material ini bersifat dinamis mengikuti pola adaptasi dari agen terhadap lingkungannya (Hadiwinata, 2017, hlm. 274- 276).

Dalam dunia internasional terdapat berbagai rezim (struktur) yang terjadi, namun menurut Wendt rezim ini adalah struktur yang tidak terjadi begitu saja dan bersifat dapat diubah sesuai dengan keinginan agennya. Selama sebuah struktur itu masih dianggap memiliki nilai yang baik sesuai dengan struktur ide agen, maka rezim tersebut akan tetap dipertahankan. Karna proses penciptaan struktur ini menyerupai pola penciptaan kebiasaan, seperti ungkapan seorang reporter internasional ternama yang mengamati pola kebiasaan manusia, Charles Duhigg: “*At the first you make a habit, and at the end habit makes you*” (Duhigg, 2013, hlm. 18-19). Pandangan ini juga diperkuat oleh pendapat Christian Reus-Smit yang meyakini adanya hubungan timbal balik antara agen dan struktur, dimana proses pembelajaran norma dan nilai budaya membentuk identitas yang nantinya akan memaksa aktor untuk membentuk sebuah struktur (Reus-Smit, 2005, hlm. 197). Selama struktur ini masih dianggap sesuai dengan identitas setelah melewati proses sosialisasi dari lingkungan, maka struktur tersebut yang nantinya akan semakin memperkuat identitas awal.

Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang secara *de facto* menyerahkan kekuatan militernya kepada Amerika Serikat dan membangun kembali

perekonomian nasional selama masa pemulihan. Dalam perkembangannya Jepang menjadi negara dengan tipikal US-Centris, dimana aliansi utama, pembela, dan mitra dagang berporos pada kebijakan Amerika Serikat (Takashi & Jain, 2000, hlm. xii). Hal ini yang memperlihatkan kecenderungan kebijakan Jepang yang pada mulanya isolasionisme sebelum Perang Dunia II, kini menjadi internasionalisme yang memiliki pandangan negara ideal dalam dunia internasional adalah negara yang memiliki kapasitas ekonomi yang kuat dan mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat untuk memperkuat keamanan. Namun identitas ini berubah ketika Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump, keluar dari keanggotaan TPP yang semula merupakan promotor dalam kemitraan Trans Pasifik tersebut. Jepang tidak lagi mengikuti jejak langkah kebijakan Amerika Serikat, bahkan menginisiasi untuk merekonstruksi TPP menjadi CPTPP.

Perubahan identitas Jepang ini dapat dijelaskan melalui konstruksi nilai, norma, prinsip, dan aspek historis (struktur ide) bangsa Jepang. Struktur ide ini dapat berubah karena menimbulkan efek regulatif dan konstitutif yang dapat mendorong Jepang untuk terus memperbarui definisi identitas dan kepentingannya sesuai dengan konstruksi struktur ide awal yang lebih melekat padanya. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II dan kemudian mendapatkan krisis kepercayaan internasional sebagai *economic animal* pada masa kepemimpinan PM Takuei Tanaka, Jepang mulai melakukan proses sosialisasi dan pembelajaran tentang norma dan nilai baru dalam pergaulan internasional yang dikembangkan melalui rezim internasional mengenai keberhasilan multilateralisme melalui perdagangan bebas dalam menjaga reputasi negara di mata dunia (Eiji, 2007).

Sehingga identitas yang semula mengikuti arah kebijakan Amerika Serikat terutama dalam sektor ekonomi, kemudian berubah menjadi tidak mendukung unilateralisme Amerika Serikat oleh Donald Trump dan menjadi *leader* bagi pembentukan CPTPP. Perubahan kondisi internasional berupa keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan TPP juga

mempengaruhi arah perubahan kepentingan Jepang dalam perjanjian kemitraan TPP, yang awalnya hanya melakukan tindakan perekonomian yang sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, berubah menjadi nasionalisme ekonomi berupa peningkatan ekspor terhadap negara-negara anggota yang masih tersisa dan non anggota dari seluruh kawasan untuk menjaga keseimbangan perdagangan Jepang.

Kepentingan ekonomi tersebut juga diiringi dengan kepentingan politik berupa peningkatan peran dalam kawasan Asia Pasifik. Perubahan terhadap identitas dan kepentingan tersebut dapat dikaji melalui struktur ide Jepang yang memandang perdagangan bebas multilateralisme sebagai sumber perekonomian domestik dan peningkatan peran global. Struktur ide ini dibentuk dari aspek historis Jepang yang meraih keberhasilan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi pasca kekalahannya oleh Sekutu dan perkembangan nilai dan norma melalui perdagangan bebas (Ohmae, 1987, hlm. 112).

Menurut Nicholas Onuf struktur ide ini juga dapat diamati melalui *Linguistic Turn*, berupa simbol-simbol linguistik dari bahasa seorang pemimpin negara maupun tokoh penting dalam konstitusi negara terkait dalam menyampaikan kepentingannya di forum internasional. Sehingga dalam sebuah pidato (*speech acts*) terdapat komunikasi simbolik yang mengandung intensi dengan otentisitas dan originalitas yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan dokumen resmi berupa kebijakan, peraturan, dan perjanjian, yang sudah melalui proses rekayasa formalitas (Hadiwinata, 2017, hlm. 274). Oleh karena itu penting untuk mengamati pidato PM Shinzo Abe, Menteri Negara untuk Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Toshihiro Motegi, serta tokoh domestik lainnya yang terkait terutama dengan manfaat kebijakan multilateralisme dan perdagangan bebas serta peran Jepang dalam menginisiasi pembentukan kemitraan CPTPP, untuk mengetahui intensi yang di refleksikan secara eksplisit dalam bahasa.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka asumsi dasar peneliti dalam menjelaskan motif Jepang merekonstruksi TPP pasca pengunduran keanggotaan Amerika Serikat pada tahun 2017, karena didasari pada struktur ide perdagangan bebas yang merubah identitas Jepang dari *little brother* AS menjadi *leader* dalam perjanjian kemitraan CPTPP dengan kepentingan ekonomi peningkatan ekspor dan politik dalam meningkatkan peran global di kawasan Asia Pasifik.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan memperoleh data secara ilmiah yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2013, hlm. 2). Subjek penelitian ini adalah negara Jepang dengan tingkat analisa dari negara bangsa masyarakat Jepang. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah perjanjian kerja sama TPP yang kemudian direkonstruksi menjadi CPTPP, pasca keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan tahun 2017. Metode yang dipakai untuk menganalisis data adalah metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis eksplanasi Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2007, hlm. 16-18).

Data yang diambil berupa data primer yaitu *speech* ataupun pernyataan dari PM Shinzo Abe, Menteri Negara untuk Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Toshimitsu Motegi, serta beberapa tokoh domestik penting lainnya, mewakili pandangan konstitusi dalam kurun waktu 2011 hingga 2018 terhadap kemitraan perdagangan bebas multilateralisme di kawasan Asia Pasifik. Kemudian data primer ini nantinya didukung oleh data sekunder berupa pengumpulan data dari dokumen yang sudah ada maupun penelitian yang sudah dilakukan akademisi lainnya sebagai acuan untuk melengkapi data.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini memiliki fokus pada motif Jepang dalam merekonstruksi perjanjian kemitraan TPP, yang didasari pada pengaruh struktur normatif domestik terhadap perubahan identitas dan kepentingannya terhadap CPTPP. Skala waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak tahun 2013 saat Jepang menandatangani perjanjian kemitraan TPP, hingga Juli 2018 ketika Jepang meratifikasi CPTPP.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik dan aplikasi teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, menjabarkan sejarah hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dari masa Restorasi Meiji hingga keduanya menjadi anggota TPP. Penjabarannya akan terbagi dalam empat periode, yaitu periode modernisasi Jepang di bawah Comodor Perry tahun 1853- 1890, periode ekspansionisme Jepang tahun 1890- 1945, periode Perang Dingin, dan periode pasca Perang Dingin yang terdiri dari kerja sama keamanan serta ekonomi antara Jepang dengan Amerika Serikat.

Bab III, memaparkan dinamika perkembangan TPP yang diawali dengan sejarah pembentukan TPP, pengaruh positif keanggotaan Amerika Serikat bagi TPP, respons negatif masyarakat internasional terhadap TPP, serta status Jepang dan Amerika Serikat dalam TPP tahun 2017 yang dijabarkan melalui tiga tahapan. Tahapan pertama mengenai Amerika Serikat sebagai negara non anggota, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dampak keluarnya Amerika Serikat dari TPP, dan diakhiri dengan Jepang sebagai *leader* dari CPTPP.

Bab IV, berisikan motif rekonstruksi TPP oleh Jepang melalui pendekatan konstruktivisme oleh Alexander E. Wendt yang mampu menjelaskan perubahan sikap Jepang dari pembentukan struktur non material berupa ide perdagangan

bebas, yang mempengaruhi perubahan identitas berawal dari *follower* Amerika Serikat kini menjadi *leader* di kawasan Asia Pasifik, dengan kepentingan ekonomi berupa peningkatan ekspor serta politik dalam meningkatkan peran global.

Bab V, berisikan kesimpulan mengenai struktur ide perdagangan bebas Jepang yang mampu mempengaruhi perubahan identitas sebagai *leader* dan kepentingan ekonomi serta politik Jepang dalam kemitraan CPTPP.